Peran Lembaga Adat Melayu dalam Demokrasi Lokal di Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara

Benediktus Josua Gea¹, Cindy Nurhasanah², Dinda Amalia Nasution³, Mery Fernandes Sinaga⁴, Zahra Nur Aqilah⁵, Julia Ivanna⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: benediktusjosuagea20@gmail.com¹, cindynur1210@gmail.com²,
dindaamalia.nst@gmail.com³, merisinaga2510@gmail.com⁴,
zahranuraqila681@gmail.com⁵, Juliaivanna@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kearifan lokal, serta berpartisipasi dalam demokrasi lokal. Penelitian ini menyoroti peran Lembaga Adat Melayu, khususnya MABMI (Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia) di Medan, Sumatera Utara, dalam pengambilan keputusan politik lokal dan demokrasi, seperti Pilkada. Namun peran lembaga adat di Daerah Jalan Brigjend Katamso, Medan, mulai memudar karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan mediator sosial. MABMI sebagai lembaga adat independen tidak terafiliasi dengan partai politik dan memberikan kebebasan anggotanya dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pengambilan keputusan publik. Melalui musyawarah dan pendekatan budaya, MABMI turut berperan dalam memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan daerah dan budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang lebih inklusif. Meskipun menghadapi tantangan, MABMI tetap memainkan peran penting dalam menjaga kearifan lokal, mendorong kesadaran politik, dan menolak politik uang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga adat sangat penting untuk mengembalikan peran vital lembaga adat dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat demokrasi lokal.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, MABMI, Demokrasi Lokal, Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat.*

Abstract

Traditional institutions have an important role in maintaining social stability and local wisdom, as well as participating in local democracy. This research highlights the role of Malay Traditional Institutions, especially MABMI (Indonesian Malay Cultural Traditional Council) in Medan, North Sumatra, in local political and democratic decision making, such as regional elections. However, the role of traditional institutions in the Jalan Brigjend Katamso area, Medan, is starting to fade due to low public awareness of the importance of the existence of traditional institutions as guardians of traditions and social mediators. MABMI as an independent traditional institution is not affiliated with political parties and gives its members freedom in the democratic process, both in regional head elections and public decision making. Through deliberation and a cultural approach, MABMI plays a role in providing advice to the government and community regarding regional and cultural development, as well as encouraging community participation in a more inclusive democracy. Despite facing challenges, MABMI continues to play an important role in maintaining local wisdom, encouraging political awareness, and rejecting money politics. This research uses a qualitative descriptive method through observation, interviews and literature study. The research results show that collaboration between the community, government and traditional institutions is very important to restore the vital role of traditional institutions in maintaining social stability and strengthening local democracy.

Keywords: *Traditional Institutions, MABMI, Local Democracy, Local Wisdom, Community Participation.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga-lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berantakan, dan cita-cita individual dan sosial pun tak mungkin terwujud. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dan cita-citanya. Harus diakui bahwa banyak kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi oleh setiap orang. Manusia dan masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga salah satunya lembaga adat, Lembaga adat juga memiliki hukum adat, yang dibentuk dari keberadaan persekutuan hukum atau disebut juga masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*). Kumpulan masyarakat ini terformulasi dalam masyarakat teratur, bersifat tetap dan memiliki kekuasaan, kewenangan untuk mengurus kekayaan sendiri baik materil maupun immateril. Penghalusan dan pengembangannya dilaksanakan melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang.

Lembaga Adat memainkan peran penting yakni sebagai mobilisator basis massanya melalui instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrument adat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dukungan untuk mendukung calon-calon peserta pemilu dalam berbagai bentuk. Peran dan keterlibatan lembaga adat dalam demokrasi lokal merupakan suatu hal yang telah berlangsung lama dan telah mengalami perkembangan yang dinamis sampai saat sekarang ini, termasuk dalam pembahasan tentang peran lembaga adat dalam demokrasi lokal yaitu Pilkada. Lembaga adat Melayu juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Namun, di daerah Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, peran lembaga adat ini mulai memudar. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat lembaga adat Melayu selama ini telah menjadi simbol kearifan lokal dan instrumen dalam menjaga harmoni serta kestabilan sosial. Kemunduran peran ini bisa terlihat dari minimnya partisipasi lembaga adat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi di tingkat lokal. (Manik, 2019).

Salah satu penyebab utama dari kemunduran peran lembaga adat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung mengabaikan fungsi lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan mediator dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat tidak lagi melibatkan lembaga adat dalam urusan-urusan sosial dan politik, yang pada akhirnya berpengaruh pada melemahnya peran lembaga adat dalam demokrasi lokal. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah terhadap lembaga adat juga sangat minim. Pemerintah lokal belum memberikan perhatian yang memadai, baik dalam bentuk kebijakan maupun dukungan finansial, untuk membantu lembaga adat tetap eksis dan berfungsi dengan optimal. Minimnya dukungan ini menjadi hambatan besar bagi lembaga adat dalam menjalankan tugas dan perannya, khususnya dalam menjaga keseimbangan demokrasi lokal. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, lembaga adat sulit untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan politik di daerah tersebut. Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan Lembaga Adat Melayu akan semakin terpinggirkan dan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat itu sendiri untuk mengembalikan peran penting lembaga adat dalam demokrasi lokal. Dengan demikian, lembaga adat dapat kembali menjadi penggerak dalam menjaga harmoni sosial dan ikut serta dalam proses demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat lokal. (Abdullah, 2020).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengumpulkan atau memperoleh informasi dari banyak sumber sehingga tujuan penelitian dapat tercapai melalui wawancara. Metode penelitian pada hakikatnya didasarkan pada pengolahan data deskriptif (Satori, 2010). Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk

menjelaskan penelitian yang sudah ada tanpa memberikan manipulasi data variabel dan dipelajari dengan melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017). Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan dengan cara mengidentifikasi apa yang diperlukan dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengannya tujuan penelitian.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang sangat akurat. Sebab, data tersebut berasal langsung dari pemilik tempat penelitian.
3. Studi pustaka
Penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti buku-buku, dan jurnal di berbagai perpustakaan dan mencari referensi dari berbagai sumber internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat Melayu dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Lokal

MABMI singkatan dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, MABMI sudah berdiri selama 57 tahun, jika melihat dari aspek keberadaannya Fungsi dan kedudukan MABMI dan perannya ada di daerah, yang jelas dalam perpolitikan di Indonesia bahwasanya MABMI merupakan organisasi kemasyarakatan bukan organisasi politik, MABMI ini ada di masyarakat yang bersifat independen artinya MABMI ini tidak dibawah partai politik, dalam masalah dukungan terhadap salah satu calon kepala daerah ataupun presiden itu MABMI bersikap independen maksudnya yaitu MABMI membebaskan kepada anggotanya untuk memilih siapa calon kepala daerah ataupun presiden yang akan dipilih, itu merupakan hak berdemokrasi konstitusional secara pribadi selaku anggota MABMI, maka dari itu MABMI taat terhadap aturan yang bersifat independensi itu, lalu peran MABMI dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah di tingkat lokal yaitu tentunya berpihak kepada rakyat dalam konteks ini MABMI itu adalah organisasi yang bergerak di bidang adat istiadat jadi spesialisnya adat dan budaya dulu, dalam hal ini langkah nyatanya pertama MABMI itu menjaga kearifan lokal, dan etnis khusus mabmi yaitu etnis Melayu, khususnya di Medan, tanah Deli yaitu tanah Melayu, tapi setiap etnis menghargai eksistensi suku Melayu, dan MABMI juga sering mengkritik pemerintahan, jadi dalam konteks sejauh mana MABMI berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan itu mekanisme ada, pertama secara aktif MABMI memberikan saran pemikiran dan konsepsi pemikiran bagaimana pembangunan budaya di kota Medan khususnya di Sumatera Utara, Indonesia, Dengan memberikan saran secara tertulis kepada pemerintah, mau pemerintah kota Medan atau pun Deli Serdang, yang mayoritasnya Melayu.

Umumnya Melayu yang ada di pantai timur Sumatera Utara, antara Langkat, Binjai, Medan, Karo, Pakpak Barat, Dairi, Deli Serdang, Sergai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, dan termasuk juga daerah Pantai Barat Sumatera Utara, jadi peran MABMI dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan itu dengan cara mabmi melakukan rapat dan merespon apa yang ingin di sampaikan kepada pemerintah, baik Pemda maupun Pusat, pemerintah juga sering melibatkan MABMI untuk bermusyawarah serta berdiskusi bagaimana pembangunan daerah ini bisa dilaksanakan dengan semangat menjaga Koordinator Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ada dibentuklah forum etnis, forum pembaruan, dan forum adat, itulah cara pemerintah menghimpun pemikiran etnis yang ada. Jadi dalam peran nya MABMI ikut serta dalam pengambilan keputusan dengan cara seperti itu.

Bagaimana Lembaga Adat Melayu Terlibat Dalam Proses Proses Demokrasi, Seperti Pemilihan Kepala Daerah atau Pengambilan Keputusan Public

Dalam proses-proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengambilan keputusan publik, Lembaga Daerah melayu atau MABMI ini sangat independent, hal ini di tegaskan ulang oleh Bapak Drs. Hairul Muslim, selaku Kepala Lembaga Adat Melayu di daerah Medan, MABMI merupakan lembaga adat yang bersifat independent, tidak di bawah tekanan dari partai politik manapun, sehingga dalam proses-proses demokrasi politik seperti

pemilu, lembaga adat melayu ini tidak akan menekan siapapun anggotanya dalam memilih salah satu calon, dan membiarkan demokrasi itu tetap ada dan di junjung tinggi.

Tidak hanya itu MABMI juga membantu memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin yang baik kepada masyarakat, hal ini juga sejalan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses-proses demokrasi, seperti pilkada ataupun pemilu, serta memberikan pemahaman terkait pentingnya suara masyarakat dan pentingnya mengetahui terkait bagaimana calon-calon yang akan memimpin itu juga sangat penting dalam suatu pemilihan, karena itu akan mempengaruhi nasib kedepannya kita sebagai masyarakat. Selain itu, memberikan arahan-arahan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan demokrasi, masyarakat juga harus terus diingatkan terkait pemahaman tentang cara-cara memilih dan memberikan hak suaranya dengan sebaik baiknya dan bukan hanya disebabkan pengaruh atau hasutan dari pihak lain yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. (Rahmad, 2023).

Prinsip Prinsip Adat, Seperti Musyawarah, Diterapkan Dalam Pengambilan Keputusan Politik Lokal

Seperti dikatakan oleh bapak Drs. Hairul Muslim bahwasanya dalam mempengaruhi keputusan politik, sejauh ini MABMI mempunyai tugas merangkul masyarakat. Peran MABMI dalam musyawarah itu adalah dengan merespon semua keluhan kesah masyarakat dan akan di sampaikan kepada pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. "Walaupun MABMI ini tidak partisipasi (tidak dalam naungan partai politik)" seperti di jelaskan oleh bapak Drs. Hairul Muslim akan tetapi prinsip-prinsip adat, seperti musyawarah, diterapkan dalam pengambilan keputusan politik lokal mengedepankan partisipasi masyarakat secara aktif. Bapak Drs. Hairul Muslim juga menyampaikan bahwasanya cara pemerintah menghimpun pemikiran-pemikiran masyarakat dalam sebuah keputusan politik dengan adanya kelompok-kelompok etnis yang ada. Dari pernyataan bapak Drs. Hairul Muslim diatas sudah menyatakan bahwa dalam proses musyawarah, setiap anggota komunitas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan tujuan bersama. Keputusan biasanya diupayakan melalui konsensus, bukan suara mayoritas, sehingga semua pihak merasa terlibat dan dihargai. Percakapan yang terbuka dan transparan menjadi ciri khas dalam musyawarah. Selain itu, keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan nilai-nilai serta tradisi lokal, menjadikannya lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Peran pemimpin adat sebagai mediator juga sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas proses, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya efektif, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Partisipasi Dalam Demokrasi

Peran lembaga adat Melayu, yang dikenal sebagai MABMI, dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam demokrasi, khususnya dalam menjaga kearifan lokal dan budaya, terdiri dari beberapa poin utama yang telah disampaikan oleh Drs. Hairul Muslim

Pertama, MABMI memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Lembaga ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses politik, seperti menggunakan hak suara dalam pemilu. MABMI menyampaikan pesan kepada masyarakat agar memilih dengan bijak berdasarkan pengetahuan tentang calon yang akan dipilih, bukan berdasarkan politik uang.

Kedua, MABMI berperan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi. Partisipasi politik yang rendah dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Sebagai lembaga adat, MABMI secara aktif mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Melalui pendekatan berbasis budaya dan adat, MABMI membangun kesadaran politik masyarakat, mendorong mereka untuk lebih peduli dan terlibat dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum.

Ketiga, MABMI turut berperan dalam pembangunan kebijakan budaya. Lembaga ini memberikan saran dan pandangan kepada pemerintah terkait pembangunan budaya di kota Medan dan Indonesia secara umum. Dalam hal ini, MABMI memperjuangkan kearifan lokal serta

menjaga rasa toleransi. Dengan demikian, kesadaran masyarakat diperkuat bahwa demokrasi tidak hanya melibatkan politik, tetapi juga mencakup pelestarian budaya dan adat istiadat.

Keempat, MABMI mendorong perlawanan terhadap politik uang. Menyadari bahwa politik uang terjadi karena kesejahteraan masyarakat yang belum maksimal, MABMI memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh iming-iming uang dalam memilih pemimpin. Sebaliknya, mereka didorong untuk memilih berdasarkan kapabilitas dan visi-misi calon pemimpin.

Melalui peran-peran tersebut, MABMI berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi, sekaligus menjaga nilai-nilai Adat dan Budaya Melayu.

SIMPULAN

Lembaga Adat Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Namun, di daerah Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, peran lembaga adat ini mulai memudar. Salah satu penyebab utama dari kemunduran peran lembaga adat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung mengabaikan fungsi lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan mediator dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat tidak lagi melibatkan lembaga adat dalam urusan-urusan sosial dan politik, yang pada akhirnya berpengaruh pada melemahnya peran lembaga adat dalam demokrasi lokal.

Namun di balik memudarnya peran lembaga adat ini, disini, MABMI sebagai lembaga adat melayu khususnya di daerah Medan masih menjadi lembaga yang mampu mengambil keputusan di tingkat lokal, kemudian sebagai lembaga adat yang mampu berperan dalam proses-proses demokrasi di saat pemilu atau pilkada, dan sebagai penyalur juga terkait membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan demokrasi.

Dalam proses-proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengambilan keputusan publik, lembaga daerah melayu atau MABMI ini sangat independent, MABMI merupakan lembaga adat yang bersifat independent, tidak di bawah tekanan dari partai politik manapun, sehingga dalam proses-proses demokrasi politik seperti pemilu, lembaga adat melayu ini tidak akan menekan siapapun anggotanya dalam memilih salah satu calon, dan membiarkan demokrasi itu tetap ada dan di junjung tinggi. Tak hanya itu saja, peran MABMI dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan itu dengan cara melakukan rapat dan merespon apa yang ingin di sampaikan kepada pemerintah, baik Pemda maupun Pusat. Pemerintah juga sering melibatkan MABMI untuk bermusyawarah serta berdiskusi bagaimana pembangunan daerah ini bisa dilaksanakan dengan semangat menjaga Koordinator Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah forum etnis, forum pembaruan, dan forum adat, itulah cara pemerintah menghimpun pemikiran pemikiran etnis yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan jurnal ini. Terutama kepada:

1. Dosen Pembimbing Julia Ivanna, S.Sos. M.A.P. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga dalam setiap tahap penulisan jurnal ini.
2. Rekan-rekan penelitian yang telah memberikan dukungan moral serta diskusi yang bermanfaat selama proses penelitian berlangsung.
3. Universitas Negeri Medan yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan rasa syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang berlipat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). Teori Terbentuknya Lembaga Adat.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah*.
- Manik, H. (2019). Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat. *Jurnal Selat*, 216-217.
- Rahmad, N. (2023). Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Politik Hukum dan Demokrasi*, 65-67.
- Satori, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.